

PELAKSANAAN FUNGSI SOSIALISASI POLITIK PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) DI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
YENNY WAHYUNNY
NIM. E02110011

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.
E-mail: wahyunnyenny@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan permasalahan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan fungsi sosialisasi politik partai NasDem yang tidak berjalan secara optimal di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi sosialisasi politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kubu Raya sendiri sesungguhnya belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, sehingga masyarakat belum berminat untuk memilihnya. Meskipun partai Nasional Demokrat (NasDem) telah melakukan sosialisasi dengan menawarkan program-programnya, bahkan melalui lembaga-lembaga yang telah di bentuk oleh Partai NasDem, semua itu belum bisa mengambil hati dan simpati masyarakat, terlihat dari jumlah perolehan suara yang di peroleh belum mencapai target. Dari pernyataan yang telah di paparkan di atas terlihat dari jumlah perolehan suara dalam pemilihan umum legislatif partai NasDem yang belum mencapai target, partai NasDem menargetkan mendapat 3000 (tiga ribu) suara dalam setiap kecamatan, namun jumlah suara yang di peroleh tidak mencapai 1000 (seribu) hanya ratusan saja. Disini dapat di simpulkan bahwa partai NasDem belum mampu mengambil simpati masyarakat untuk lebih memilihnya, program-program yang di tawarkan juga belum dapat mengambil simpati masyarakat untuk lebih memilihnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori, Michael Rush dan Phillip Althoff (2002-37) tentang Kendala pola sosialisasi politik, Hambatan Sosial ekonomi, Kendala Sistem Politik, Metode penyampaian pesan.

Kata-kata Kunci : Sosialisasi Politik, Partai Politik.

ABSTRACT

Political socialization is part of the socialization process that particular form of political values, which shows how. should each member of the community to participate in the political system. As for the purpose of writing this problem is to determine the limiting factors that led to the implementation of political socialization function NasDem party that does not run optimally in Kubu Raya. Based on the observations show that the implementation of political socialization function performed by the National Democratic Party (NasDem) in Kubu Raya itself actually has not been able to carry out its functions optimally, so that people are not interested to select it. Although the National Democratic Party (NasDem) has the program by offering programs, even through the institutions that have been in the form NasDem Party, all of it has not been able to take heart and sympathy of society, seen from the number of votes obtained yet reached the target . From the statement that has been in the mentioned above can be seen from the number of votes in the election NasDem party who has not reached the target, targeting NasDem party got 3000 (three thousand) vote in each district, but the number of votes obtained was not reached in 1000 (one thousand) only hundreds only. Here it can be concluded that the parties have not been able to take sympathy NasDem community to better select, programs on offer is also not able to take a more public sympathy to select it. The theory used in this research is the theory, Michael Rush and Phillip Althoff (2002-37) of the constraints of political socialization patterns, Socioeconomic Barriers, Obstacles Political System, method of delivery of the message.

Keywords: Political Socialization, Political Parties.

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktek-praktek politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu. Salah satunya adalah partai politik. Sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik menyebutkan: "Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Partai politik juga menjadi sarana sosialisasi politik (*Instrument of Political Socialization*) dalam usaha menguasai pemerintahan melalui perjuangannya dalam pemilihan umum partai politik harus menciptakan dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai politik berusaha menciptakan "*image*" bahwa ia mewakili rakyat, karena itu selain menanamkan solidaritas dengan partai, juga harus dapat mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan berusaha menempatkan kepentingan pribadi di

bawah kepentingan nasional (Budiardjo, 1996:164).

Selanjutnya menurut Gabriel A. mengemukakan tentang sosialisasi politik, yakni :

"Bahwa sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya". (Almond, 1990:67).

Sosialisasi politik adalah suatu proses belajar yang kontinu yang melibatkan baik belajar secara emosional maupun indoktrinasi politik yang nyata dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Rumusan ini menunjukkan betapa besar peranan komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat. Tidak salah jika dikemukakan bahwa segala aktivitas komunikasi politik berfungsi pula sebagai suatu proses sosialisasi bagi anggota masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas komunikasi politik tersebut.

Begitu juga menurut Budiardjo (1996:163-166) ,ada empat fungsi partai politik, yaitu:

1. Sarana Komunikasi Politik

Komunikasi Politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Papol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah,

dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum.

3. Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

4. Sarana Pengatur Konflik

Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat (DPR/DPD/Camat) untuk

mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi.

Salah satu fungsi partai politik adalah sosialisasi politik, dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses penyampaian atau transformasi nilai-nilai politik kepada individu-individu secara terus menerus sehingga dia akan memberikan reaksinya terhadap fenomena politik yang terjadi. Melalui proses sosialisasi politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis.

Fenomena yang muncul kemudian adalah partai politik tidak dapat mengefektifkan fungsi-fungsinya tersebut, salah satunya adalah dalam sosialisasi politiknya. Partai politik yang seharusnya memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat dan mengajarkannya untuk bersosialisasi dan berpartisipasi malah sebaliknya membuat masyarakat buta politik. Partai politik hanya memikirkan bagaimana memobilisasi masyarakat untuk mendukung partainya sehingga dapat memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam komunikasi politik pun partai politik telah gagal menjadi "broker", partai politik lebih menyuarakan kepentingan kelompoknya daripada mendengarkan jeritan suara masyarakat, pada akhirnya kebijakan yang muncul banyak merugikan masyarakat. Ironisnya, partai politik yang diharapkan dapat berperan sebagai pihak yang mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dalam lembaga legislatif maupun dalam masyarakat malah

seringkali terjebak dalam situasi konfliknya sendiri, sehingga bukan menjadi inspirasi penyelesaian konflik melainkan menjadi pihak yang berkonflik, bahkan sumber dari konflik. Adanya kekecewaan masyarakat terhadap partai-partai politik pemenang pemilihan umum pada tahun 1999, yang kurang mampu memperbaiki kehidupan bangsa, dalam memberi peluang pada partai politik baru untuk mendapat legitimasi dari masyarakat.

Dalam kesempatan penelitian ini akan diteliti tentang pelaksanaan fungsi sosialisasi politik partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Kubu Raya, Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai partai baru yang diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat (NasDem). Hal ini terlihat dari bisnis media yang dipimpinnya, Metro TV, yang selalu memberikan berita terbaru seputar aktivitas Partai Nasional Demokrat (NasDem). hadir di dalam perpolitikan Indonesia yang secara resmi lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Hukum dan HAM, yang berarti Partai Nasional Demokrat (NasDem) berhak ikut dalam Pemilu 2014 ini, yang telah diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 lalu.

Gerakan Perubahan adalah salah satu *Tagline* dari partai ini, yang dimana istilah Restorasi menjadi tujuan utama yaitu bermula sebagai gerakan perubahan untuk memperbaiki kondisi (Negara, bangsa, dan masyarakat) yang sedang rusak atau menyimpang dari

tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Gerakan Restorasi yang di usung Partai Nasional Demokrat (NasDem) meletakkan tujuan dan cita-cita dengan menjadikan pancasila sebagai senjata spiritual, dan rakyat Indonesia sebagai senjata materialnya. Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Hal ini sejalan dengan Pemikiran Surya Paloh bahwa Sebuah cita-cita perjuangan politik yang dicetuskan hendaknya diperjuangkan bersama-sama untuk mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, yakni Rakyat Sejahtera, Bangsa Bermartabat, Negara Kuat, yang belakangan ini dinamakan Trilogi Restorasi Indonesia. Searah dengan visi dan misi partai NasDem yaitu, menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan melalui Restorasi Indonesia. Sebagai partai baru, Partai Nasional Demokrat (NasDem) perlu melakukan seluruh persiapan agar semua program penguatan berstruktur partai dan konsolidasi berjalan efektif. Termaksud melaksanakan sosialisasi ke tiap-tiap daerah untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang visi dan misi Partai Nasional Demokrat (NasDem) agar masyarakat dapat tertarik, dan salah satunya di Kabupaten Kubu Raya.

Menjelang pemilihan umum (pemilu) partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Kubu Raya

telah dulu melaksanakan sosialisasinya ke tiap-tiap desa, dengan memberikan penawaran-penawaran program seperti, kemandirian dalam pangan, memberikan santunan sebesar Rp.1.000.000 kepada setiap pemegang kartu anggota partai Nasional Demokrat (NasDem). Adapun program jangka pendek yang telah ditawarkan oleh partai NasDem yaitu melalui program pembuatan kartu Badan Penanggulangan Jaminan Sosial (BPJS) yang di biyai selama satu tahun, dari program jangka pendek tersebut partai Nasional Demokrat (NasDem) juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan lembaga perlindungan anak. Untuk program jangka panjang, partai NasDem menawarkan kepada masyarakat seperti infrastruktur jalan, gang. Namun dari sosialisasi-sosialisasi dan program-program yang telah di tawarkan oleh partai NasDem belum dapat mengambil simpati rakyat.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh partai Nasional Demokrat (NasDem) melalui penandatanganan kontrak politik, yang dilakukan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya dan dengan melakukan sosialisai-sosialisasi dari desa ke desa, partai Nasional Demokrat (NasDem) juga menawarkan program-programnya, dan dengan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dan usaha lain yang dilakukan oleh partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk menarik perhatian masyarakat yaitu dengan membentuk satu koordinator untuk satu desa, dan satu kordinatoor membentuk satu koordinator di

tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), untuk dapil Sungai Raya terdiri dari 7 desa salah satunya desa Sungai Raya Dalam, sungai raya, parit baru, Teluk Kapuas, Arang Limbung, limbung dan Desa Kuala Dua. Satu dapil terdiri dari 321 tps jika NasDem mampu mengakomodir 321 TPS, di dalam satu desa yang memiliki satu coordinator dalam satu desa, dan satu koordinator desa membentuk satu koordinator di tingkat TPS, dan mereka harus bisa merekrut sepuluh orang, karena jika dalam 321 desa di kalikan dengan satu TPS yang berjumlah 10 orang maka total suara yang akan di peroleh oleh partai NasDem sebanyak 3210 suara, dan itu sudah mencapai target, namun berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan, jumlah suara yang di dapat partai Nasional Demokrat (NasDem) masih jauh dari target, dan belum mencukupi kuota yang ada. Meskipun pada saat kampanye banyak program-program yang di tawarkan oleh partai NasDem, namun program partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kubu Raya juga mereka belum mampu mengambil kepercayaan masyarakat terhadap partai Nasional Demokrat (NasDem) yang merupakan partai baru.

Dalam pelembagaannya Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Kubu Raya juga memiliki program sosialisasi politik untuk melakukan pendekatan dan pendukung dengan masyarakat, beberapa organisasi sayap yang mendukung dan telah di bentuk, seperti:

1. Garda Pemuda
2. Garda Wanita

3. Liga Mahasiswa

Garda Pemuda Nasional Demokrat (NasDem) adalah organisasi kepemudaan yang bernaung di bawah Nasional Demokrat dan menjadi sayap politik partai Nasional Demokrat (NasDem). Garda Pemuda Nasional Demokrat (NasDem) bertujuan sebagai pengawal dan pengaman partai Nasional Demokrat (NasDem). Sedangkan Garda Wanita dibentuk atas dasar pemikiran gender, dimana perempuan pun diberikan kebebasan menentukan system politik dan terlibat dalam aktifitas politik. Garda Wanita berupaya memberikan penganbndian dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berdampak pada partai Nasional Demokrat (NasDem), melalui Garda Wanita. Pula partai Nasional Demokrat (NasDem) Kubu Raya berupaya merekrut perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan untuk mau terlibat dalam politik ataupun tertarik untuk bergabung gerakan Nasional Demokrat Kabupaten Kubu Raya.

Dan Liga Mahasiswa dibentuk atas elemen-elemen kaum intelektual kampus dengan membawa restorosi demokrasi. Mahasiswa dijadikan pilar utama pemuda untuk membangun system politik yang lebih pro terhadap rakyat dengan slogan belajar, berpartai dan berbakti. Kata "Berpartai" menunjukkan bahwa partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam perekrutan anggota ingin melibatkan kalangan mahasiswa untuk masuk dalam partai politik.

Meskipun partai Nasional Demokrat (NasDem) telah melakukan sosialisasi dengan

menawarkan program-programnya, bahkan melalui lembaga-lembaga yang telah di bentuk oleh Partai NasDem, semua itu belum bisa mengambil hati dan simpati masyarakat, terlihat dari jumlah perolehan suara yang di peroleh belum mencapai target. Dari pernyataan yang telah di paparkan di atas terlihat dari jumlah perolehan suara dalam pemilihan umum legislatif partai NasDem yang belum mencapai target, partai NasDem menargetkan mendapat 3000 (tiga ribu) suara dalam setiap kecamatan, namun jumlah suara yang di peroleh tidak mencapai 1000 (seribu) hanya ratusan saja.

Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi sosialisasi politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kubu Raya sendiri sesungguhnya belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, sehingga masyarakat belum berminat untuk memilihnya. Disini dapat di simpulkan bahwa partai NasDem belum mampu mengambil simpati masyarakat untuk lebih memilihnya, program-program yang di tawarkan juga belum dapat mengambil simpati masyarakat untuk lebih memilihnya.

Dalam pemilihan umum (pemilu) setiap daerah pasti memiliki calon-calon legislatif (caleg) yang akan ikut dan bersaing dengan caleg lain dari suatu daerah untuk memperebutkan kekuasaan. Dan untuk mendapatkan kekuasaan bukan lah hal yang mudah, para calon dari masing-masing partai harus mampu memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Di dalam setiap daerah mempunyai jumlah penduduk yang

tidak sedikit, dan disitu para calon legislatife (caleg) harus mampu mengambil simpati masyarakat untuk memilihnya menjadi calon wakil rakyat. Seperti di Kabupaten Kubu Raya yang memiliki jumlah penduduk yang sudah mempunyai hak pilih yang tidak sedikit jumlahnya, menurut sumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya bahwa dengan jumlah pemilih laki-laki sekitar 200,849 dan jumlah perempuan 194,728.

Dan dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah seluruhnya ada 395,577 pemilih yang harus dihadapi oleh partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat bahwa partai Nasional Demokrat (NasDem) layak untuk di pilih dan para calon legislatifnya layak untuk mewakili masyarakat di parlemen. Untuk meyakinkan masyarakat memilih partai dan memilih calon anggota legislatif ini tentu tidak mudah, harus ada upaya yang dilakukan oleh para calon legislatife (caleg) dan partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk merebut hati para masyarakat Kubu Raya agar masyarakat berpihak kepada mereka.

Namun menurut Rosliansyah Ramli Saleh, SE.MM selaku bidang organisasi keanggotaan dan kaderisasi partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kubu Raya menyatakan bahwa para calon legislatife (caleg) partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kubu Raya ini sesungguhnya sangat kurang melaksanakan sosialisasi ke desa-desa sehingga masyarakat juga kurang mengenal mereka sebagai calon legislatife (caleg) partai

Nasional Demokrat (NasDem). Alasan ini juga merupakan salah satu mengapa partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Kubu Raya belum melaksanakan fungsi sosialisasi politik dengan optimal.

Dalam pelaksanaan sosialisasi politiknya Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kubu Raya juga kurang memberikan sosialisasi tentang pendidikan politik terhadap masyarakat. Sesungguhnya tujuan diberikannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwa. Tujuan Pendidikan Politik adalah merupakan pedoman kepada kehidupan masyarakat Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Alfian (1986:235) dalam bukunya *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* bahwa Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu system politik yang ideal yang hendak dibangun.

Sampai saat ini, realitas pendidikan politik Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing

pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Padahal pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2010–2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan meningkatkan tata pemerintahan (*governance*), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Kondisi ini akan semakin buruk ketika masyarakat Indonesia belum paham mengenai bagaimana sebuah sistem demokrasi dan politik yang sedang berjalan di bangsa ini dan bagaimana mereka dapat berperan mendapatkan akses untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi kemajuan bangsa ini. Hal tersebut menunjukkan rendahnya peran partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya sehubungan dengan pelaksanaan fungsi sosialisasi politiknya sebagai partai politik baru dengan mengambil judul “Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya.”

2. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang

menyebabkan pelaksanaan fungsi sosialisasi politik partai NasDem yang tidak berjalan secara optimal di Kabupaten Kubu Raya.

3. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialisasi politik, merupakan proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan-rangsangan politik. Tingkah laku politik seseorang berkembang secara berangsur-angsur. Jadi, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.

Menurut Rush & Althoff (2011:47) menjelaskan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan

bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Fungsi sosialisasi politik menurut Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik (2010-56) antara lain :

- a. Membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa,
- b. Memelihara kebudayaan politik suatu bangsa,
- c. Mengubah kebudayaan politik suatu bangsa.
- d. Proses sosialisasi politik tidak langsung meliputi metode berikut:

1. Pengoperasian

- Interpersonal.

Mengasumsikan bahwa anak mengalami proses sosialisasi politik secara eksplisit dalam keadaan sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam hubungan-hubungan dan pemuasan-pemuasan interpersonal.

2. Magang

Metode belajar magang ini terjadi karena perilaku dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di dalam situasi-situasi non politik memberikan keahlian-keahlian dan nilai-nilai yang pada saatnya dipergunakan secara khusus di dalam konteks yang lebih bersifat politik.

3. Generalisasi

Terjadi karena nilai-nilai social diperlakukan bagi objek-objek politik yang lebih spesifik dan dengan demikian membentuk sikap-sikap politik tertentu.

b. Proses sosialisasi langsung terjadi melalui:

1. Imitasi

Merupakan mode sosialisasi yang paling ekstensif dan banyak dialami anak sepanjang perjalanan hidup mereka. Imitasi dapat dilakukan secara sadar dan secara tidak sadar.

2. Sosialisasi Politik Antisipatoris

Dilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan atau akan diemban oleh actor. Orang yang berharap suatu ketika menjalani pekerjaan-pekerjaan professional atau posisi social yang tinggi biasanya sejak dini sudah mulai mengoper nilai-nilai dan pola-pola perilaku yang berkaitan dengan peranan-peranan tersebut.

3. Pendidikan Politik

Inisiatif mengoper orientasi-orientasi politik dilakukan oleh "socialiers" daripada oleh individu yang disosialisasi. Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu system politik. Di satu pihak, warga Negara memerlukan informasi minimal tentang hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki untuk dapat memasuki arena kehidupan politik. Di lain pihak, warga Negara

juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara.

4. Pengalaman Politik

Kebanyakan dari apa yang oleh seseorang diketahui dan diyakini sebagai politik pada kenyataannya berasal dari pengamatan-pengamatan dan pengalamn-pengalamannya didalam proses politik.

Berbagai definisi tentang sosialisasi politik yang dikemukakan oleh para ilmuwan politik pada hakekatnya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu sosialisasi politik merupakan salah satu fungsi dari system politik yang harus dan wajib untuk dilakukan dan dijalankan. Sosialisasi politik ini memiliki fungsi untuk menetapkan dan memelihara sistem politik itu sendiri, Dengan kata lain proses ini dilakukan untuk mendapatkan orientasi politik individu maupun masyarakat secara umum berkaitan dengan partisipasi politik yang mungkin dilakukan sebagai hasil dari sosialisasi.

2. Proses dan Metode Sosialisasi Politik

Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan,, seperti "keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka", bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda itu

mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik.

Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangatlah penting. Dan anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu sebagai berikut.

1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.
2. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
4. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

Proses sosialisasi sendiri umumnya berjalan secara berangsur-

angsur mulai dari kanak-kanak sampai dewasa, di dalamnya terdapat suatu proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri. Pada sistem politik masyarakat modern, institusi seperti kelompok sebaya, komunitas, sekolah, kelompok kerja, perkumpulan-perkumpulan sukarela, media komunikasi, partai-partai politik dan institusi pemerintah semuanya dapat berperan dalam sosialisasi politik. Kemudian perkumpulan-perkumpulan, relasi-relasi dan partisipasi dalam kehidupan kaum dewasa melanjutkan proses tersebut untuk seterusnya.

Dalam suatu bangsa yang majemuk dan besar seperti Indonesia, India, Cina dan sebagainya, informasi yang diterima oleh aneka unsur masyarakat akan berlainan karena faktor geografis baik yang di kota maupun di desa. Pada sebagian besar negara berkembang, pengaruh media masa (radio, surat kabar dan televisi) di pedesaan sangat terbatas. Oleh karena itu, pengaruh struktur-struktur sosial tradisional dalam menterjemahkan informasi yang menjangkau wilayah tersebut amatlah besar. Heterogenitas informasi ini memperkuat perbedaan orientasi dan sikap (attitude) diantara kelompok-kelompok yang mengalami sosialisasi primer yang amat berbeda dari kelompok ataupun teman sebaya.

Berbeda dengan negara yang sudah maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya arus informasi relatif homogen. Para elite politik pemerintahan mungkin mempunyai sumber-sumber informasi khusus melalui badan-badan birokrasi tertentu, surat kabar tertentu yang ditujukan pada kelompok kelas atau politik tertentu. Dengan demikian, semua kelompok masyarakat mempunyai akses ke suatu arus informasi dan media massa yang relatif homogen dan otonom sehingga hambatan-hambatan bahasa atau orientasi kultural sangat minim. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap para elite politik dan sebaliknya kaum elite-pun dapat segera mengetahui tuntutan masyarakat dan konsekuensi dari segala macam tindakan pemerintah.

3. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun belum cukup tua. Bias dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi Negara. Dan ia baru ada di Negara modern. Partai politik dilihat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga

pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan

Fenomena Partai Politik di Indonesia dalam Menjalankan Fungsinya

Banyak terjadi kegagalan pada sistem politik Indonesia, diantaranya tentang adanya wacana sistem ekonomi pancasila, demokrasi terpimpin terpimpin, dan yang masih hangat diingatan kita adalah tentang terjadinya campur aduk antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer. tidak satu pun sistem pemerintahan suatu negara benar-benar sama dengan negara lainnya. Namun Indonesia yang menganut sistem presidensiil, selalu ada juga wacana tentang koalisi, padahal kita ketahui bersama bahwa sistem presidensiil tidak mengenal adanya koalisi. Hal ini tidak ada teori yang bisa menjelaskannya.

Ini adalah sebagian fenomena pada sistem politik di Indonesia. Berbeda lagi dengan fenomena partai politiknya. Banyak hal yang normatif dilanggar dalam tataran etika bermasyarakat dan etika politik. Hal yang sering dijumpai adalah masalah pembiayaan partai politik dan keterlibatan birokrat.

Birokrasi pemerintah yang strukturnya mulai dari pusat pemerintahan sampai ke struktur di bawah di desa-desa ditempati oleh sumber daya manusia yang besar sekali. Sumber daya manusia ini bisa direbutkan untuk mendukung partainya. Ditilik dari pemikiran yang sederhana ini, maka upaya partai politik mempengaruhi, menguasai dan mengeksploitasi birokrasi pemerintah beserta sumber-sumbernya untuk kepentingan

partainya tidak bisa dielakkan (Miftah Toha, 2004).

Partai politik yang berhasil menempatkan kadernya pada posisi eksekutif, maka mereka akan berupaya mempengaruhi birokrat untuk mendukung atau dengan cara memanipulasi untuk mendapatkan akses dana bagi partai politiknya. Cara yang dilakukan terkadang juga melalui jalur formal seperti penguasaan tender dan sebagainya.

Seharusnya birokrat (Pegawai Negeri Sipil) terlepas dari ikatan dan pengaruh partai politik, apapun bentuknya. Memaksa dan mengharuskan seorang PNS untuk memilih partai politik tertentu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak politik PNS yang bersangkutan (Afan Gaffar, 2006). Jika ada indikasi dukung-mendukung partai politik dalam birokrasi di Indonesia, maka kestabilan pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan akan terganggu.

Fenomena lain yang mengganggu pikiran kita adalah dalam hal kampanye saat akan dimulainya pemilihan umum. Dua kali pemilihan umum belakangan ini terjadinya perkembangan pemikiran aktifis partai politik dalam mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Terjadi saat kampanye, hampir semua partai politik baik yang berideologi islam maupun nasionalis menempuh cara yang sama yakni meramaikan panggung dengan menghadirkan artis terkenal.

Kegagalan Partai Politik di Indonesia Menjalankan Fungsinya Fungsi partai politik yang ditulis oleh Miriam Budiarjo dan Sukarna di atas merupakan fungsi yang selalu tidak maksimal dan bahkan gagal

diimplementasikan oleh partai politik.

Begitu pula menurut Budiarjo (2003:404) Partai politik dapat diartikan sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini sering kali informasi yang disampaikan oleh partai politik kepada masyarakat justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional melainkan kepentingan partai yang sempit akibat pengkotakan politik. Sering kali juga terjadi apa yang diinginkan oleh masyarakat bertentangan dengan apa yang telah dilakukan pemerintah karena fungsi legitimasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Terjadi paradoks partai politik sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Partai politik memanfaatkan peran tersebut untuk berkontribusi kepada partainya sendiri.

4. Pendidikan Politik

Pendidikan Politik, merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun juga baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator dan sebagainya. Pendidikan politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada warga negara dimana keterlaksanaannya sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang. Disisi lain kegiatan ini juga dipandang sebagai proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan

yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya.

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatis yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Ada berbagai pendapat para ahli mengenai pendidikan politik, antara lain :

1. Menurut Khoiron dkk (1999:4) Pendidikan politik pada hakikatnya adalah sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu, atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial, dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat.
2. Begitu pula menurut Kartono (1996 : 64) Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian agar menadang dalam perjuangan politik Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang

internasional, di sengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

3. Sementara, menurut Kantaprawira (1988:54) pendidikan politik adalah suatu upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Alfian (1986:235) dalam bukunya *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* bahwa Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu system politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan politik menurut Instruksi Presiden No. 12 tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi muda adalah sebagai berikut: Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian

proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien.

Sampai saat ini, realitas pendidikan politik Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Padahal pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2010–2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan meningkatkan tata pemerintahan (*governance*), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Masyarakat telah menyadari, salah satu penyebab utama tersendat-sendatnya proses reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis adalah kurang terdidiknya mayoritas warga negara secara politik, akibat proses pembodohan politik yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Orde Baru.

Pada konteks Indonesia, pelaksanaan pendidikan politik tidak bisa begitu saja diharapkan atau

diserahkan kepada pemerintah, sebab: Pertama, berdasarkan pengalaman rezim yang pernah berkuasa di Indonesia, belum ada indikasi kuat bahwa pemerintah yang sementara berkuasa, akan konsisten untuk melaksanakan pendidikan politik. Kedua, pemerintahan Indonesia yang hingga saat ini, belum mampu melahirkan suatu kebijakan penting dalam hal pendidikan politik bagi warga negara.

Itu berarti, pendidikan politik, paling tidak untuk masa transisi (transisi dari rezim otoritarian menuju rezim yang demokratis) sekarang ini, akan lebih efektif dan maksimal jika dilaksanakan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, diantaranya masyarakat politik yang tergabung dalam partai politik.

Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran pendidikan politik sangat diharapkan untuk membentuk karakter dan mental generasi muda untuk dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif. Suatu

tuntutan yang pada hakekatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan.

4. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif yaitu menggunakan hasil penelitian secara apa adanya dari objek yang diteliti. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh moleong (2006:18) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala, atau objek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Adapun tempat penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Merupakan tempat kantor DPD dan DPW partai NasDem bernaung
- b. Lokasi penelitian mudah dijangkau
- c. Wilayah penelitian tidak terlalu luas

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tahap pra penelitian dan persiapan penelitian, meliputi pengumpulan data, dilakukan mulai bulan Oktober 2013 hingga Desember 2013.
- b. Tahap penyusunan dilakukan selama 11 (sebelas) bulan, yaitu

mulai bulan Januari 2014 hingga November 2014.

- c. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan mulai tahap pengumpulan data, penyusunan hingga selesai, yaitu bulan Oktober 2013 hingga November 2014.

5. PEMBAHASAN

1. Kendala Pola Sosialisasi Politik

Sebagai agen sosialisasi Partai NasDem harus dapat mensosialisasikan partainya melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga dapat diterima masyarakat terutama yang menjadi sasaran utamanya.

Pola sosialisasi politik yang tepat di dalam suatu partai politik akan mudah diterima oleh para kader-kader partai NasDem, dan sebaliknya apabila pola sosialisasi tersebut menyimpang dan kurang maksimal akan terjadi kegagalan dan bisa jadi tidak dapat diterima oleh para kader-kader partai NasDem maupun terhadap masyarakat.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Eko Waluyo (selaku staf DPD partai NasDem di Kubu Raya) bahwa

“kami telah memberikan pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses dimana berlangsung dalam keluarga, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung, namun upaya yang telah kami lakukan ini belum mampu

menarik simpati masyarakat di Kabupaten Kubu Raya ini.”

Partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya ini memang telah memiliki anggota dan pengurus partai tetap untuk itu pola sosialisasi politik yang telah diberikan kepada masyarakat harus tetap seimbang, partai NasDem juga tetap berupaya agar masyarakat di Kubu Raya dapat bersimpati untuk memilihnya. Maka dari itu terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh partai NasDem di Kubu Raya untuk menjaga anggota dan simpatisnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Randi Suzaini selaku (ketua DPD partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya) yaitu:

“Sesungguhnya di DPD NasDem Kubu Raya terdapat rapat koordinasi setiap bulan di beberapa tingkat kepengurusan mulai dari anggota DPD maupun dengan anggota sayap kanan NasDem, guna memantau dan evaluasi pergerakan kepengurusan agar dapat mengarahkan pengurus dan anggota tetap menjaga konstituennya jadi setiap diadakannya rapat kami selalu membahas tentang masalah-masalah yang menjadi kendala akan tetapi kendala terhadap pola sosialisasi politik ini tidak lah begitu memprihatikan untuk kami”.

Hal yang berbeda dikatakan pula oleh Bapak Rosliansyah Ramli Saleh, SE.MM selaku bidang organisasi keanggotaan dan kaderisasi partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kubu Raya bahwa :

“Pola sosialisasi yang telah dilakukan oleh partai NasDem sebenarnya sudah cukup baik akan tetapi dalam pengoptimalan

kemampuan organisasional partainya masih kurang, yang dimana partai NasDem kurang dalam berupaya menjaga komunikasi dengan jaringan organisasinya yaitu menjaga komunikasinya ke tingkat bawah jaringan strukturnya maka dari itu ada beberapa organisasi sayap NasDem tidak berjalan sebagaimana semestinya.”

Sesungguhnya pola pemeliharaan hubungan dengan para anggota juga merupakan bentuk dari pelaksanaan mekanisme pola sosialisasi politik, dimana partai NasDem Kubu Raya juga melakukan rapat koordinasi dan evaluasinya dengan para anggotanya, akan tetapi itu semua dilakukan hanya sepihak, karena tidak semua dilakukan dengan optimal, maka dari itu juga yang menjadi penghambat dalam pengoptimalan sosialisasi politik partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya.

Langkah-langkah yang telah dilakukan partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya dalam mengambil simpati masyarakat sesungguhnya telah berjalan dengan semestinya seperti bersosialisasi memberikan santunan sebesar Rp.1.000.000 kepada setiap pemegang kartu anggota partai Nasional Demokrat, Untuk program jangka panjang, partai NasDem menawarkan kepada masyarakat seperti infrastruktur jalan, gang. Namun dari sosialisasi-sosialisasi dan program-program yang telah di tawarkan oleh partai NasDem belum dapat mengambil simpati rakyat. Maka dari itu partai NasDem menargetkan mendapat 3000 (tiga ribu) suara dalam setiap kecamatan, namun jumlah suara yang di peroleh

tidak mencapai 1000 (seribu) hanya ratusan saja.

Sebagai partai baru partai NasDem sesungguhnya telah menunjukkan eksistensi yang luar biasa melalui sosialisasi terhadap masyarakat dengan banyak memberikan santunan dan membuat program-program yang dapat dikatakan sangat mempengaruhi kinerja para kader partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya.

2. Kendala Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam sebuah partai politik baik dalam demokrasi yang baru berkembang maupun dalam demokrasi yang sudah mantap. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa status sosial ekonomi dalam partai politik mempunyai pengaruh langsung pada lembaga-lembaga publik formal. Persoalan budget tidak dapat dipungkiri sebagai aspek yang berpengaruh bagi sebuah partai politik dalam membangun sebuah lembaga organisasi yang telah dibentuk didalamnya. Diperlukan biaya yang cukup besar untuk mengelola sebuah organisasi partai politik yang ada agar terbentuk sempurna karena Ketersediaan anggaran dana yang besar menurunkan hal yang mutlak harus dimiliki.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Bapak Haris Iswanda (Staf DPW Partai NasDem) berpendapat bahwa,

“Menurut saya hal yang paling berat dalam mengelola sebuah organisasi partai politik adalah mengatur sebuah ekonominya, karena dalam suatu organisasi politik

yang besar memang harus memiliki dana yang cukup besar dan kuat untuk mendukung sebuah organisasi tersebut agar berjalan dengan lancar”.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Della (Staf DPW Partai NasDem)

“Kurang mendukungnya sumber daya keuangan yang memadai serta akses yang terbatas terhadap sumber pendanaan yang dibutuhkan, Kurangnya sumber pendanaan terlihat dari kondisi ekonomi partai politik tersebut. Kurangnya dana dalam partai politik ini memang sering terjadi di setiap partai politik mana pun termasuk di partai Nasdem sendiri. Kurangnya dana sebenarnya dapat menghambat aktifitas sebuah partai politik, karena untuk menarik simpati masyarakat partai politik harus sanggup mempromosikan dirinya agar masyarakat tertarik. Melalui media elektronik maupun media sosial”.

Kurangnya pendanaan dan beban tanggung jawab dalam ruang publik politik dibatasi juga oleh akses informasi yang sangat minim, mengakibatkan pelaksanaan suatu partai politik tersebut menjadi kurang optimal. Harus diakui bahwa ekonomi dalam suatu partai politik memang harus seimbang antara kualitas kerja dan ekonominya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua DPD partai NasDem Bapak Randi Suzaini, diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Dana yang ada memang terbatas untuk dikelola kembali oleh partai NasDem, dengan dana yang minim itulah kami sebisa mungkin untuk menghemat biaya pengeluaran

yang ada agar tidak terlalu boros, tetapi pengeluaran yang terjadi tidak bisa dihentikan dikarenakan banyaknya keperluan dan atribut partai yang harus di beli, uang khas yang ada juga ikut terpakai apabila ada kegiatan sosialisasi di partai ini, masalah ekonomi ini yang sebenarnya yang begitu berat saya rasakan dalam partai karena kurang dana sedikit saja pelaksanaan sosialisasi partai bisa terhambat”.

Masalah terbesar dalam mengelola sebuah partai politik adalah soal ekonomi, karena ekonomi yang tidak memadai akan memperlambat kerja sebuah partai politik tersebut begitu juga kebalikannya. Begitu juga dengan partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya, sumber dana yang kurang membuat kegiatan sosialisasi partai dapat terhambat anggaran yang dikeluarkan bukanlah sedikit-sedikit karena untuk mencapai suatu keberhasilan dalam sebuah partai politik partai NasDem harus mengeluarkan dana untuk memenuhi segala kebutuhan partai NasDem di Kubu Raya. Sehingga anggaran dana yang ada juga akan sedikit demi sedikit akan menipis.

3. Kendala Sistem Politik

Sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut sistem politik haruslah selalu seimbang dan mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur seperti, parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik. Selanjutnya, memungkinkan sistem

politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaanya (Mochtar, 1989:23-24). Berakhirnya rezim orde baru pada masa pemerintahan soeharto tidak lain karena disebabkan oleh masalah sistem ekonomi dan sistem politiknya, pada saat itu pemerintahan orde baru cenderung bercorak otoriter sehingga rakyat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih demokratis. Pergantian pemerintahan dari soekarno ke tangan soeharto secara tidak langsung merupakan kelanjutan dari pemerintahan yang bercorak otoriter. Dimana selama berkuasa, presiden soekarno juga bersifat otoriter dengan menganggap dirinya sebagai presiden seumur hidup. Kejadian tersebut terulang kembali pada masa pemerintahan orde baru, yang akhirnya runtuh karena tidak mampu merespon tuntutan-tuntutan yang berkembang di masyarakat. Sistem partai politik juga biasa dilakukan melalui penguatan 4 (empat) komponen kunci, yakni, pengakaran partai (*party rooting*), legitimasi partai (*party legitimacy*), aturan dan regulasi (*rule and regulation*), dan daya saing partai (*competitiveness*). Pengakaran partai dimaksudkan agar partai terikat secara organik dengan masyarakat, khususnya dengan konstituennya. Dengan ini partai dapat secara kontinyu menjalankan fungsi-fungsinya yang terhubung secara langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi politik dan juga agregasi kepentingan yang lebih luas. Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak H.Syarif Abdullah Al-Kadrie, SH,MH selaku ketua DPW partai

NasDem Kubu Raya sebagai berikut :

“Dalam kesisteman partai NasDem juga menampakan bagaimana partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya melaksanakan fungsi parpolnya dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh partainya. Mekanisme dan prosedur yang dilakukan partai NasDem di Kubu Raya dalam pelaksanaan partainya ini berupaya perluasan agar semuanya masuk kedalam kesisteman partai, maka upaya melalui sosialisasi politik yang dilakukan partai NasDem Kubu Raya ini adalah bagian dari kesisteman karena selain sebagai mekanisme, sosialisasi juga melaksanakan fungsi partai politik dan dimana fungsi partai politik tersebut merupakan bagian terpenting bagi ukuran sistem politik, akan tetapi system politik ini juga dapat menjadi kendala bagi kami karena dilakukan dengan tidak maksimal dan karena anggota sering bersifat apatis.”

Akan tetapi cara berpolitik yang salah juga akan mengakibatkan kegagalan dalam membangun sebuah sistem politik yang ada, harus relevan dalam memberikan informasi politik agar diteruskan dari satu bagian system politik kepada bagian yang lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang sangat berkesinambungan. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu Yuliana (Staf DPW partai NasDem) bahwa :

“Cara berpolitik yang salah juga dikarenakan kurangnya pendidikan politik yang berikan suatu partai tersebut terhadap kader-kadernya,

pendidikan politik di dalam partai politik itu harus berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya agar program yang dilaksanakan berjalan lancar.

Pendidikan politik dalam suatu partai politik itu juga memang harus dilaksanakan agar para kader-kader partai tidak kaku dalam membahas soal masalah politik, fungsi pendidikan politik di dalam partai politik sesungguhnya untuk meningkatkan pengetahuan politik agar para kader-kader partai dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, dan harus paham terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik yang sangat kompleks agar tidak dianggap hanya benalu di dalam sebuah partai politik.

4. Kendala Metode Penyampaian Pesan

Metode penyampaian pesan juga berkaitan dengan identitas partai politik yang berdasarkan ideologi atau platform partai. Dilihat dari metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Dimana pendidikan politik adalah proses biologis diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui pendidikan politik, masyarakat memahami serta mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya. Proses ini dilakukan dalam upaya pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai, norma dan simbol politik. Contoh

pendidikan politik adalah diskusi, seminar, kursus, latihan kepemimpinan, aktif dalam organisasi dan lain-lain. Proses indoktrinasi politik merupakan cara proses penurunan nilai-nilai/budaya politik yang dilakukan secara sepihak. Biasanya indoktrinasi politik dilakukan penguasa/pemimpin dengan cara memanipulasi masyarakat agar bersedia menerima nilai, norma serta simbol yang dianggap baik oleh penguasa. Berdasarkan wawancara penulis terhadap Bapak Randi Suzaini (selaku ketua DPD partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya), mengatakan bahwa:

“Dalam metode penyampaian pesan partai NasDem di Kubu Raya selalu memberikan yang terbaik untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Dengan adanya upaya sosialisasi politik yang intensif yang diberikan oleh partai NasDem di Kubu Raya sangat berkesinambungan dalam masyarakat, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran politik yang tinggi. Baik masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan maupun daerah pedesaan yang terpencil sekalipun. Minimal masyarakat dapat mengetahui apa, siapa, dan bagaimana struktur politik di negara mereka”.

Akan tetapi sosialisasi yang telah diberikan oleh partai NasDem di Kubu Raya ini tidak semata-mata langsung dapat diterima oleh masyarakat, terdapat kendala-kendala yang telah digaris bawahi yang akan dihadapi oleh parti NasDem dalam upaya mensosialisasikan politik di Kabupaten Kubu Raya. Sebagaimana

yang dipaparkan langsung oleh Bapak Kurnia Taufik (selaku staf DPW partai NasDem Kubu Raya), bahwa :

“Kendala dalam upaya sosialisasi politik partai NasDem di Kubu Raya, masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan turunnya partai ke masyarakat maka ada ‘sesuatu’ yang akan diberikan atau mereka berpikiran ‘transaksional’ yang pada akhirnya akan menimbulkan *Money politic*. Ini merupakan bagian yang sedikit rumit bagi anggota dan pengurus partai NasDem di Kubu Raya dalam mensosialisasikan dirinya. Tetapi partai NasDem tetap memberikan arahan bagaimana partainya akan bergerak kedepannya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.” Adanya pemikiran pragmatis masyarakat mengenai politik dan partai politik, hadir dari kurang berjalan optimalnya partai-partai politik yang sebelumnya hadir dikalangan masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Kekurangan itu hadir berawal dari fungsi-fungsi partai politik yang tidak optimal yang di jalankan oleh partai politik, atau pelaksanaan jalannya partai tidak sesuai dengan fungsinya sebagai partai politik.

Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat dan anggota partai NasDem di Kubu Raya, maka dibutuhkan juga pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, Merujuk pada undang-undang tentang parpol, terdapat tiga orientasi pendidikan politik. *Pertama*,

meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Kedua*, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Ketiga*, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun, pada kenyataannya banyak partai politik yang tidak menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik cenderung hanya mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit parpol ketimbang kepentingan untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap dikumandang para elit parpol hanya sebuah slogan tak bermakna. Begitu juga yang dikatakan oleh kiki (selaku Staf DPW partai NasDem di Kubu Raya), mengatakan, :

“Kualitas implementasi peran dan fungsi parpol seharusnya dimulai dari proses rekrutmen dan kaderisasi pengurus parpol. Proses rekrutmen dan kaderisasi parpol harus dijalankan secara baik. Sehingga pengurus parpol bertanggung jawab menjalankan fungsi-fungsi parpol di antaranya fungsi pendidikan politik, hal ini yang sering terjadi dalam tubuh partai politik mana pun dan terutama pada partai NasDem di Kubu Raya sendiri.”

Pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol selama ini lebih banyak tidak memberikan kesadaran, partisipasi, dan kepribadian politik. Tetapi lebih

kepada mobilisasi, dan transaksional. Sehingga parpol tidak melakukan pemberdayaan (*empowering*), malah justru yang terjadi adalah “pemberdayaan” masyarakat. Kondisi tersebut tentunya tidak akan menguntungkan bagi bangsa dan negara Indonesia, dan kalau dibiarkan saja permasalahan ini berlarut-larut akan semakin menjerumuskan bangsa ini menuju jurang kehancuran.

Kondisi ini menuntut setiap partai politik untuk mengoreksi sejauhmana orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten dan terus-menerus. Hal tersebut sangat penting dilakukan, agar partai-partai politik memerankan dirinya sebagai masyarakat politik yang mampu mengatasi segala permasalahan bangsa, khususnya tentang pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan politik.

6. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari keempat faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan fungsi sosialisasi politik partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya seperti faktor pola sosialisasi politik, Sosial ekonomi, Sistem Politik dan Metode penyampaian pesan, penulis menyimpulkan bahwa faktor metode penyempian pesan lah yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi sosialisasi politik partai NasDem di Kubu Raya.

a. Kendala Pola Sosialisasi Politik

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan bahwa faktor pola sosialisasi politik seperti :

kendala pada pola pemeliharaan hubungan dengan para anggota juga merupakan bentuk dari pelaksanaan mekanisme pola sosialisasi politik , dimana partai NasDem Kubu Raya juga melakukan rapat koordinasi dan evaluasinya dengan para anggota nya, akan tetapi itu semua dilakukan hanya sepihak, karena tidak semua dilakukan dengan optimal, maka dari itu juga ada beberapa organisasi sayap NasDem yang tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan kurangnya pengoptimalan kemampuan organisasional partai.

b. Kendala Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam sebuah partai politik baik dalam demokrasi yang baru berkembang maupun dalam demokrasi yang sudah mantap. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa status sosial ekonomi dalam partai politik mempunyai pengaruh langsung pada lembaga-lembaga publik formal. Persoalan budget tidak dapat dipungkiri sebagai aspek yang berpengaruh bagi sebuah partai politik dalam membangun sebuah lembaga organisasi yang telah dibentuk didalamnya. Diperlukan biaya yang cukup besar untuk mengelola sebuah organisasi partai politik yang ada agar terbentuk sempurna karena Kesedian anggaran dana yang besar menurunkan hal yang mutlak harus dimiliki.

c. Faktor Sistem Politik

Sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel, apabila partai politik mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat

modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.

d. Metode Penyampaian Pesan

Metode penyampaian pesan memang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi politik partai NasDem di Kubu Raya. Dalam metode penyampaian pesan ini partai politik harus berperan optimal sehingga partai yang dijalankan menjadi bermakna, maka dibutuhkan juga pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, Namun, pada kenyataannya banyak partai politik yang tidak menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik cenderung hanya mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit parpol ketimbang kepentingan untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap dikumandangkan para elit parpol hanya sebuah slogan tak bermakna.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kendala Pola Sosialisasi Politik

Perlu adanya evaluasi dan tahapan-tahapan yang dilalui Partai NasDem dalam pelaksanaan sosialisasi politiknya. Bagaimana

pengurus sebagai agen sosialisasi Partai NasDem mensosialisasikan partainya melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga dapat diterima masyarakat terutama yang menjadi sasaran utamanya.

2. Kendala Sosial Ekonomi

Dalam dunia politik sangat dipastikan membutuhkan sejumlah dana yang banyak. Apalagi dalam mengelola sebuah partai politik tidak sedikit yang harus dikeluarkan untuk kepentingan partai sehingga partai tersebut dapat terlaksana dengan lancar.

3. Kendala Sistem Politik

Perlu adanya evaluasi pada sistem politik partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

4. Kendala Metode Penyampaian Pesan

Dalam metode penyampaian pesan partai NasDem di Kabupaten Kubu Raya perlu ditingkatkan lagi terutama dalam bidang pendidikan politiknya. Agar masyarakat dan anggota partai NasDem di Kubu Raya tidak terjerumus dalam *Moneypolitic*, Kondisi ini menuntut setiap partai politik untuk mengoreksi sejauhmana orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten dan terus-meneru

7. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1990. *Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama.
- Almond, Gabriel. (1990) *Budaya Politik, Tingkah Laku, Demokrasi di Lima Negara* Jakarta: Bumi Aksara. ,

- Anonym, 2010. *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa*, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung : CV Sinar Baru.
- Kartono, Kartini 1996, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung : Mandar Maju.
- Khoiron, M. Nur. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja)*. IKIS: Yogyakarta.
- Mas'ood, Mochtar. 2006, *Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta*, Gajah Mada University.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rajawali Rosda Karya.
- Michael Rush And Philip Althoff. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Naning, Ramdlon, 1982. *Pendidikan politik dan regenerasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan, 2003. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yugha, 2014. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta: PT. Erlangga
- Sumber Lainnya :
- Undang-undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik.
- Sumber Jurnal :
- Eria Rangga Andika, (2013) Dalam Judul *Skripsi Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Banyumas*.
- Adi Pranadipa, (2013) *Dalam Judul Skripsi Peran Partai Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Di Kota Tanjungpinang*.
- Sumber internet :
- Acal, Afifudin. 2012. *Pendidikan Politik di Garda Pemuda Nasdem*. Di akses pada tanggal 14 juni 2013 dengan alamat:
<http://www.beritacomtakadapendidikanpolitikdigardapemudanasdem>.
- Elang, Suherman. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Diakses pada tanggal 12 agustus 2013 dengan alamat:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sistempolitikindonesia>.

Heri, Hirawan. 2013. *Pendidikan Politik di Indonesia*. Diakses pada tanggal 21 Desember 2013 dengan alamat:

<http://berita.com/pendidikan/politik-pondidikanIndonesia>





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Yenny Wahyunny
NIM / Periode lulus : E0210011 / 2015
Fakultas/Jurusan : Fisipol / Administrasi Negara Prodi Ilmu Politik
E-mail address/HP : wahyunnyenny@yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Pelaksanaan fungsi Sosausasi Politik Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Kubu Raya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal [Signature]

[Signature]
Orki Fahrensyah S. IP. M. S.
NIP. 196611222002121002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 8 April 2015

[Signature]
(Yenny Wahyunny)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).